

**PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN PEMAHAMAN BASIS  
AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DINDA LILLY SARAH**

**188330201**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/3/23

**PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN PEMAHAMAN BASIS  
AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DINDA LILLY SARAH**

**188330201**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/3/23

**PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN PEMAHAMAN BASIS  
AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH :**

**DINDA LILLY SARAH**

**188330201**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/3/23

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.  
Nama : Dinda Lilly Sarah  
NPM : 188330201  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak)  
Dosen Pembimbing



(Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA)  
Pembanding

Mengetahui



(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA)  
Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)  
K.a Prodi Akuntansi

Tanggal/ Bulan/Tahun Lulus : 09/02/2023

## **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA**”, yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 08 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan

Peneliti



**DINDA LILLY SARAH**

**NPM. 188330201**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Lilly Sarah  
NPM : 188330201  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 08 Maret 2023  
Yang menyatakan,



**DINDA LILLY SARAH**

**NPM. 188330201**

## ABSTRACT

*This research aimed to find out the effect of employee performance and understanding of the accrual basis on the financial statement quality of regional office of the Ministry of Law and Human Rights North Sumatra. The approach used in this research is the quantitative approach. Data used in this research are primary data and secondary data. The population in this research are managers of work units or officials related to finance. The samples in this research were 51 respondents of regional office of the ministry of law and human rights in North Sumatra, specifically working in finance or accounting in each division. Data collection techniques consist of questionnaires and interview. The data analysis technique used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The result of the research shows that the employee performance has a positive and significant effect of the financial statement quality, understanding of the accrual basis has a positive and significant effect of the financial statement quality, employee performance and understanding of the accrual basis simultaneously has a significant effect of the financial statement quality.*

**Keywords : Employee Performance, Understanding Of The Accrual Basis, Financial Statement Quality.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di kantor wilayah kementerian hukum dan ham sumatera utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat yang berkaitan dengan keuangan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 pegawai di kantor wilayah kementerian hukum dan ham sumatera utara yang bekerja di bagian keuangan atau akuntansi di tiap divisinya. Teknik pengumpulan data terdiri dari kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pemahaman basis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Pemahaman Basis AkruaI, Kualitas Laporan Keuangan.**



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan pada tanggal 13 September 2000 dari Ayah Rahmad dan Ibu Misni. Peneliti merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara, yang memiliki 3 kakak dan 1 abang. Peneliti merupakan lulusan dari SD MIS Muhajirin pada tahun 2012. SMP As-Syafi`iyah International school pada tahun 2015, dan pada tahun 2018 peneliti lulus dari SMK Yayasan Pendidikan Keluarga Medan, pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, pencipta Alam Semesta yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Adapun judul skripsi dari penelitian ini adalah **“PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area.

Pada kesempatan kali ini dengan segala puji dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sangat berarti dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu Ayah saya Rahmad dan Ibunda tercinta saya Misni atas jerih payah dan Do`anya selama ini kepada penulis, serta abang saya Jaka Purnama, S.H, M.A.P, kakak-kakak saya Sri Wahyuni, Irma Wahyuni, A.md, dan Evirahmadaleni, serta keponakan saya Azwa, Dira, Bintang, Adzkia yang menjadi motivasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini. Selanjutnya atas bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak, selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan masukan-masukan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku Ketua Sidang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti untuk dapat menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama seminar berlangsung untuk melengkapi skripsi peneliti.
7. Ibu Atika Rizki, SE, M.SAk selaku dosen sekretaris yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam setiap urusan yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ekonomi yang telah mengajar saya dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
9. Para pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan riset, khususnya kepada para pegawai Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga teman-teman saya C1 2018 semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya. Dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu yang diperoleh dapat disumbangkan kepada agama, nusa, dan bangsa, Amin.

**Medan, April 2022**  
**Penulis**



**Dinda Lilly Sarah**  
**NPM 188330201**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasaan Teori .....	8
2.1.1 Teori Kegunaan Keputusan ( <i>Decision Usefulness</i> ) .....	8
2.1.2 Teori Agent ( <i>Agency Theory</i> ) .....	9
2.2 Kualitas Laporan Keuangan .....	10
2.2.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan .....	10
2.2.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. ....	15
2.3 Kinerja Pegawai.....	20
2.3.1 Jenis Kinerja Pegawai.....	21
2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai .....	23
2.3.3 Indikator Kinerja Pegawai .....	24
2.4 Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar ...	25
2.4.1 Definisi SAP Berbasis Akruar .....	25
2.4.2 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	29
2.5 Penelitian Terdahulu .....	30
2.6 Kerangka Konseptual .....	33
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	34
2.7.1 Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	34
2.7.2 Pengaruh Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	35
2.7.3 Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.1.1 Jenis Penelitian .....	38
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	38
3.1.3 Waktu Penelitian .....	38

3.2 Populasi dan Sampel .....	39
3.2.1 Populasi .....	39
3.2.2 Sampel .....	40
3.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	41
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Metode Analisis Data .....	45
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	45
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	45
3.6.2.1 Uji Validitas .....	45
3.6.2.2 Uji Reliabilitas .....	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	46
3.6.3.1 Uji Normalitas .....	46
3.6.3.2 Uji Multikolinieritas .....	47
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	47
3.6.4 Uji Hipotesis .....	48
3.6.4.1 Uji Statistik (Uji-t) .....	48
3.6.4.2 Uji Kelayakan (Uji-f) .....	50
3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Deskripsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara .....	51
4.1.1 Sejarah Umum Kementerian Hukum dan HAM .....	51
4.1.2 VISI dan MISI Kementerian Hukum dan HAM .....	51
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara .....	55
4.2 Uji Kualitas Data .....	59
4.2.1 Uji Validitas .....	59
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	61
4.3 Analisis Deskriptif .....	62
4.3.1 Karakteristik Responden .....	62
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	66
4.4.1 Uji Normalitas .....	66
4.4.2 Uji Multikolinearitas .....	68
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	69
4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	70
4.6 Uji Hipotesis .....	71
4.6.1 Hasil Uji Statistik (Uji-t) .....	71
4.6.2 Hasil Uji Kelayakan (Uji-f) .....	72
4.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ) .....	73
4.7 Pembahasan .....	73
4.7.1 Pengaruh Kinerja Pegawai (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	73
4.7.2 Pengaruh Pemahaman Basis AkruaI (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	76
4.7.3 Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	80

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	89
Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden .....	97
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik .....	106
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian .....	111
Lampiran 5 Surat Balasan Izin Penelitian .....	112



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 SAP Berbasis AkruaI Dalam Akuntansi Pemerintahan .....	30
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	39
Tabel 3.2 Populasi .....	39
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	42
Tabel 3.4 Skala Likert .....	44
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas .....	60
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	62
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	62
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	64
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan .....	64
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja .....	65
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jurusan .....	65
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	70
Tabel 4.10 <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	66
Tabel 4.11 Uji Glejser .....	69
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas .....	68
Tabel 4.13 Koefisien Determinan R <sup>2</sup> .....	73
Tabel 4.14 Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-f) .....	72
Tabel 4.15 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t) .....	71



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 4.1 Sruktur Organisasi KEMENKUMHAM SUMUT .....	57
Gambar 4.2 Grafik Histogram .....	67
Gambar 4.3 Grafik P-Plot .....	67
Gambar 4.4 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	89
Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden.....	97
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik .....	106
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian .....	111
Lampiran 5 Surat Balasan Izin Penelitian .....	112



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Fokus utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara merupakan tugas pemerintahan. Era reformasi ekonomi saat ini telah melihat perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia berdampak pada perkembangan ekonomi pusat dan daerah. Mengungkapkan kinerja pemerintah kepada publik merupakan tanggung jawab wajib yang harus dipenuhi, sehingga instansi pemerintah wajib memberikan informasi kepada publik tentang kinerjanya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam proses pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai entitas publik mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan (Kinarayanti & Erawati, 2016).

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada paragraph 7 pasal 320 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia diperlukan standar akuntansi pemerintahan yang menjadi salah satu

syaratnya. Dengan ditetapkannya keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan maka dari itu pemerintah kemudian mengamanatkan tugas penyusunan standar indepenen (KSAP, 2006 dalam Rustan & Chaikal, 2019).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Psal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan besar pada sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari *cash basis* menuju *accrual basis*. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) di undur sampai dengan tahun 2014, dengan begitu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius melaksanakan transisi dari *cash-based ke accrual-based*.

Menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas serta memperjelas akan pemahaman akuntansi berbasis akrual, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akruial. Pada tahun 2015 seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi basis kas menuju akrual, menjadi akuntansi berbasis akrual penuh. Dengan pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akruial yang telah ditetapkan, akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki manfaat lebih baik bagi pengguna dan pemangku kepentingan, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah (Retnowati dan Riduwan, 2020).

PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan pula laporan keuangan yang berkualitas

itu memiliki unsur-unsur normatif. Karakteristik dari unsur-unsur normatif tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut menjadi syarat wajib untuk laporan keuangan apabila ingin dikatakan laporan keuangan daerah tersebut berkualitas (Retnowati & Riduwan, 2020). Disisi lain akuntansi basis akrual juga dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik karena akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan informasi pengguna sumber daya ekonomi yang sebenarnya serta menyajikan pengungkapan kewajiban dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan pegawai yang kompeten dan pemahaman tentang aturan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pegawai merupakan faktor penting demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap menjaga kualitas laporan keuangannya, upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil dengan mendapatkan 11 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (<http://www.kemenkumham.go.id/>, 2021).

Kementerian Hukum dan HAM mengadakan rapat audit dimana menteri meminta agar tetap menjaga konsistensi terhadap prestasi yang di raih, dengan terus menerus melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada unit pusat dan kantor wilayah kemenkumham yang kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi kepada satuan kerja sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang

berlaku.

Mengingat kinerja yang di berikan pegawai untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di perlukan juga pemahaman terhadap peraturan yang di berikan, yaitu pemahaman terhadap basis akrual yang digunakan pada laporan keuangan kemenkumham serta dengan melakukan pemetaan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang diyakini dapat menyusun laporan dengan baik dan benar. Sehingga proses penyusunan laporan keuangan benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki dasar ilmu penyusunan laporan keuangan (Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia, 2021).

Saat ini sudah banyak penelitian yang berbeda mengenai pengaruh kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dengan hasil penelitian yang sangat beragam dan bervariasi. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Kinarayanti & Erawati (2016), Putri *et all.* (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat di artikan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi basis akrual maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Ramadhani *et all.* (2018) juga menyatakan bahwa pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan dari penggunaan variabel kinerja pegawai dan variabel pemahaman basis akrual terhadap variabel terikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen yaitu kinerja pegawai, penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun terakhir

yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka dalam kaitan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan membahas permasalahan dalam penelelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara?
2. Apakah pemahaman basis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara?
3. Apakah kinerja pegawai dan pemahaman basis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas laporan

keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diujikan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi pemerintahan berbasis akrual, serta menjadi bukti empiris mengenai penerapan kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

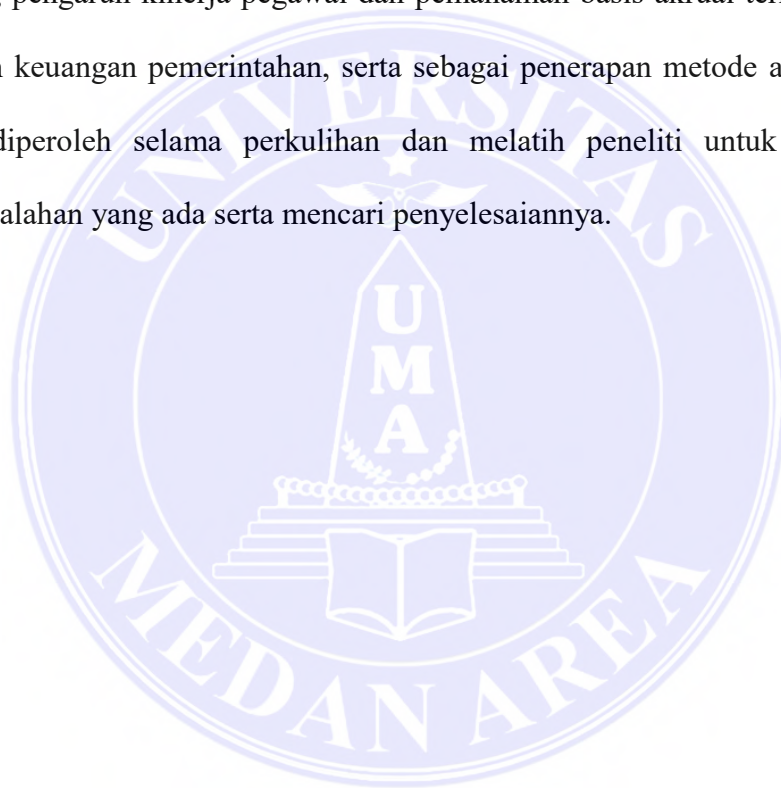
Penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan informasi, pertimbangan maupun



masukkan bagi pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangann di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas laporan keuangn.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti tentang pengaruh kinerja pegawai dan pemahaman basis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan, serta sebagai penerapan metode atau ilmu yang telah diperoleh selama perkulihan dan melatih peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Ada beberapa teori dasar yang dapat menjelaskan pengaruh kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Diantaranya adalah teori kegunaan keputusan (*decision usefulness*) dan teori agency (*agency theory*). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori tersebut :

##### 2.1.1 Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness*)

Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness*) merupakan suatu pendekatan terhadap laporan keuangan yang memiliki pandangan bahwa jika kita tidak bisa membuat laporan keuangan secara teoritis berkonsep benar, setidaknya kita bisa mencoba untuk membuat laporan keuangan yang lebih berguna (Scott, 2012:67). Teori Kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standart Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di amerika serikat.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya (Retnowati & Riduwan, 2020). Sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi berkaitan dengan pentingnya pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja keuangan dalam pelaporan

keuangan. Teori pengambilan keputusan penggunaan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk aturan yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar bermanfaat dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-kaidah yang harus dipenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nurillah, 2014:27).

### 2.1.2 Teori Agency (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*), yaitu penerima amanah (*agent*) dengan pemberi amanah (*principal*). Dalam hal ini pemberi amanah (*principal*) memberikan wewenang kepada penerima amanah (*agent*) untuk membuat keputusan terbaik, disini *agent* melakukan jasa untuk dan atas nama *principal*. Dalam sektor publik teori keagenan sudah terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Retnowati & Riduwan, 2020).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:20).

Disini, *agent* berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas kepada *principal*. Bagi pengguna selaku pemberi amanah, pelaporan keuangan digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerima amanah. Untuk mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Dari penjelasan teori diatas bahwa kinerja pegawai yang merupakan salah satu pendukung keberhasilan suatu laporan keuangan, dapat dikatakan dengan kinerja pegawai yang baik maka menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemakai laporan keuangan.

## **2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan**

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2010) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dilihat sebagai informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan berkualitas tinggi jika informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah wajar dan akurat, maka menurut prinsip akuntansi, pengguna informasi tersebut dapat memahaminya. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi

kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan (Retnowati dan Riduwan, 2020). Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi, 2011). Kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi pada laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya (Jati, 2019).

Menurut Ramadani (2015) karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas merupakan tujuan umum laporan keuangan, pelaporan yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya (Defitri, 2018). Kualitas dapat dievaluasi dengan menggunakan taraf baik buruknya atau tingkat atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif wajib dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dievaluasi menjadi laporan keuangan yang berkualitas.

### 2.2.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan merupakan persyaratan standar yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas tinggi, yaitu:

1. Relevan, terkait dengan laporan keuangan ketika informasi yang dikandungnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini dan memprediksi masa depan. Dengan cara ini, informasi penutup yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaan. Informasi relevan berikut:
  - a. Dengan bantuan informasi, pengguna dapat mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan mereka sebelumnya berkat umpan balik (nilai realisasi).
  - b. Informasi dengan nilai prediktif dapat membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.
  - c. Tepat Waktu Informasi disajikan pada waktu yang tepat sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap, yaitu Informasi akuntansi pemerintahan yang lengkap disajikan selengkap-lengkapnyanya dan mencakup semua informasi

akuntansi yang dapat mempengaruhi suatu keputusan, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang ada.

Informasi latar belakang untuk setiap elemen data utama yang disertakan dalam laporan keuangan disajikan secara ringkas, membantu menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi ini.

2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahpahaman dan kesalahan material, semua informasi disajikan dengan jujur dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut mungkin penting, tetapi jika sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
  - a. Penyajian yang akurat Informasi secara akurat merepresentasikan transaksi dan peristiwa lain yang dimaksudkan untuk direpresentasikan atau secara wajar diperlukan untuk direpresentasikan.
  - b. Dapat Diverifikasi (Verifiable) Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat diverifikasi, dan ketika verifikasi dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda secara signifikan satu sama lain.
  - c. Netralitas informasi ditujukan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dimungkinkan ketika perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika perusahaan yang dibandingkan menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Jika entitas publik menggunakan kebijakan penyusunan yang lebih baik dari kebijakan saat ini, maka perubahan tersebut akan tercermin dalam periode keuangan dimana perubahan tersebut terjadi.

4. Tentunya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dipahami oleh pemakai dan disajikan dalam bentuk dan kata-kata yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakai. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki informasi yang cukup tentang bisnis dan lingkungan operasi perusahaan pelapor dan kesediaan pengguna untuk mengetahui informasi yang disebutkan dalam laporan keuangan.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut wajib memiliki nilai informasi yang berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan pada pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta kesesuaian dengan



peraturan perundang-undangan yang menjadi panduan dalam pembuatan laporan keuangan.

### 2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

#### 1. Sumber daya manusia (SDM)

Pengertian SDM menurut Matindas (2002 : 89) dalam Kurniawan (2016 : 19) bahwa : “Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada”. Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Berbicara tentang sumber daya manusia, hidup, arti, dan peranan keberadaannya selalu aktual. Sebab sampai sekarang ini manusia tetap menjadi sentral pembahasan dalam berbagai masalah. Peristiwa macam apapun yang ada di dunia ini dan masalah apapun yang harus dipecahkan di bumi kita ini pada hakikatnya berhubungan dengan manusia. Misalnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempermudah hidup manusia dan sekaligus mempermudah hidup manusia.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik.

## 2. Teknologi informasi (TI)

Menurut Wilkinson dkk, (2000) dalam Irfan Ikhwal Haza, (2008 : 5) teknologi Informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database*), jaringan (*internet, electronic commerce*), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Pemanfaatan TI dalam akuntansi menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Irfan Ikhwal Haza, (2008 : 5) teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula menjadi perhatian:

- a. Bagian akuntansi/keuangan memiliki computer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
  - b. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
  - c. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
  - d. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.
  - f. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
  - g. Peralatan yang using atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.
3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Mahmudi (2010 : 20) dalam Madjham dkk (2013 : 4) pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai berikut : Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Efisiensi untuk mendorong dipatuhinya suatu kebijakan manajemen sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang di arahkan untuk menjaga harta organisasi, memeriksa ulang ketelitian dan keandalan suatu data akuntansi. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara.
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP).
- e. Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi
- f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Unsur-unsur sistem Pengendalian Intern dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, Mahmud. (2010 : 20-22) dalam Madjham dkk (2013 : 5) menyebutkan komponen sistem pengendalian intern pemerintah, terdiri atas lima

komponen yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian.
  - b. Penilaian Resiko.
  - c. Kegiatan Pengendalian.
  - d. Informasi Dan Komunikasi
  - e. Pemantauan
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

- a. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah.
- b. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- c. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- d. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas

Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat

diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain pemerintah, DPR/DPD, investor, kreditor dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

### 2.3 Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan segala hasil pencapaian seseorang dari segala bentuk tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam rangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kinerja yang diberikan oleh seseorang maka di harapkan dapat menghasilkan tujuan yang dapat di pergunakan dengan baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjemahkan oleh Hadari Nawawi (2006: 63) mengatakan bahwa “Kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja”. Definisi lain mengenai kinerja menurut Hadari Nawawi (2006: 63) adalah “Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan”. Kinerja menjadi rendah jika diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan.

Pendapat tentang kinerja sebagai hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan (Mangkunegara, 2011:67). Sedangkan kinerja adalah *”Effective and efficient work wich also considers personel data such as*

*measuras os accidents, absence and lardinees*” (Robbins, 2010:246). Jadi keefektifan dan keefisiensinan kerja dapat dipertimbangkan dengan data pribadi seperti pengukuran dari kesalahan, kecelakaan, ketidakhadiran dan keterlambatan kerja.

Pendapat yang lain menurut ahli yang mengatakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai suatu prestasi kerja yang di hasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam sebuah instansi (Rivai, 2011:309). Pendapat yang sama mengatakan bahwa kinerja berhubungan erat dengan sikap dari pegawai terhadap pekerjaannya, situasi kerja, kerjasama antara pemimpin dengan pegawai dan antar sesama pegawai (As`ad, 2008:35).

Khusus untuk unit bisnis, definisi kinerja tersebut menjadi perhatian agar mereka dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai aturan dan menjadi panutan bagi yang lain. Oleh karena itu, ketika setiap orang (pegawai) tidak melanggar hukum dan beretika dan bermoral, tidak akan ada perilaku yang menyimpang. Menurut definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu (Asnawi, 2019:10).

### 2.3.1 Jenis Kinerja Pegawai

Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tentunya membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda-beda tentang pencapaian hasilnya. Menurut

Kasmir (2016:182) dalam praktiknya kinerja dibagi ke dalam dua jenis yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu merupakan kinerja yang dihasilkan oleh seseorang, sedangkan kinerja organisasi merupakan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Penilaian kinerja terdiri dari pendekatan sikap, pendekatan perilaku, pendekatan hasil, pendekatan kontingensi (Robbins dalam Rozarie, 2017:65). Adapun penjelasan mengenai jenis penilaian tersebut adalah:

- a. Pendekatan sikap, pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu.
- b. Pendekatan perilaku, melihat bagaimana orang berperilaku. Kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kerja.
- c. Pendekatan hasil, perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang atau yang diselesaikan individu.
- d. Pendekatan kontingensi, pendekatan ini selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Pendekatan sikap cocok ketika harus membuat keputusan promosi untuk calon yang mempunyai pekerjaan tidak sama.



### 2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut (Sinamora, 2002) dalam Farlen (2011) :

1. Kuantitas kerja yaitu pencapaian kinerja karyawan yang dapat terlihat pada diri karyawan itu sendiri pada saat bekerja, yang meliputi ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan, ketelitian dalam mengerjakan tugas dan juga terampil dalam mengerjakan tugas.
2. Kualitas kerja adalah pencapaian kinerja karyawan yang diukur atas hasil pekerjaan yang dicapai pekerja dalam bekerja, kualitas kerja juga dapat diukur oleh output atau hasil kerja dibandingkan dengan standar output yang telah ditetapkan perusahaan.

Farlen (2011) menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja karyawannya, tinggi rendahnya kinerja karyawan dapat diukur dengan penilaian kinerja. Karakteristik karyawan yang mempunyai kinerja tinggi antara lain (Sinamora, 2002) :

1. Berorientasi pada prestasi, karyawan yang kinerjanya tinggi memiliki keinginan yang kuat membangun sebuah mimpi tentang apa yang mereka inginkan tentang dirinya.
2. Percaya diri, karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki sikap mental positif yang mengarahkan untuk bertindak dengan tingkat percaya diri yang tinggi.

3. Pengendalian diri, karyawan yang kinerjanya tinggi mempunyai rasa disiplin diri yang tinggi.
4. Kompetensi, karyawan yang kinerjanya tinggi telah mengembangkan kemampuan spesifik atau kompensasi berpertasi dalam daerah pemilihan mereka.

### 2.3.3 Indikator Kinerja Pegawai

Mangkunegara (2015) yang menyatakan "hasil kerja yang dilakukan baik kualitas atau kuantitas seorang pegawai capai dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan merupakan hasil dari kinerja". Purnomo (2008) menyatakan bahwa indikator kinerja yaitu kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja. Adapun indikator dari kinerja karyawan menurut Mas`ud (2008) adalah sebagai berikut:

1. Kualitas, keterampilan dan kemampuan seorang pegawai untuk dapat menghasilkan tugasnya dengan sempurna.
2. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan atau jumlah unit siklus akuntansi yang di selesaikan.
3. Ketepatan waktu, pegawai yang dapat menyelesaikan laporan keuangan yang tepat waktu.
4. Efektifitas, tingkat penggunaan tenaga, teknologi yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit.
5. Kemandirian, komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab

seorang pegawai terhadap pekerjaanya.

Pendapat Mas`ud (2008) tersebut menjadi teori yang peneliti pakai dalam mengukur kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dikarenakan adanya kesesuaian kebutuhan yang ingin digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

## **2.4 Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI**

### **2.4.1 Definisi SAP Berbasis AkruaI**

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah disusun mempunyai tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang jujur, terbuka, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan (Lamonisi, 2016). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10), basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui peristiwa dan transaksi pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 SAP, berbasis akruaI adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui ekuitas, utang, aset, beban, dan pendapatan dalam pelaporan keuangan berbasis akruaI serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Struktur SAP berbasis akruaI diatur berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP)

No. 71 tahun 2010. PP. No. 71 tahun 2010. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual merupakan standar akuntansi dimana transaksi ekonomi dicatat, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Secara konseptual, sistem akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi akrual diyakini dapat mendukung pelaksanaan perhitungan yang wajar atas biaya berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Mencatat dan menghitung semua pengeluaran yang dibayar dan tidak dibayar atas dasar akrual memungkinkan akuntansi akrual secara konseptual untuk memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan tepat waktu dan pengungkapan kewajiban masa depan. Pada saat yang sama, dari perspektif pengukuran kinerja, informasi akrual dapat memberikan informasi tentang penggunaan aktual sumber daya ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang saat ini diperlukan oleh pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Hamzah dan Kustiani, 2014). Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan (Najati dkk, 2016, dalam Rahamdhani dkk, 2018).

Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota atau pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah (Kinarayanti dan Erawati, 2016). Peraturan yang dimaksud adalah arahan yang harus dilakukan serta langkah yang terkait dengan kumpulan strategi dalam

mencapai tujuan. Dalam rangkaian untuk peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Peraturan tersebut diharapkan mampu menghasilkan pengukuran kinerja yang baik, serta dapat memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan penerapan akuntansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun daerah.

Perubahan pencatatan laporan keuangan dari basis kas menuju basis akrual sangat kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh dan baik mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi PP No. 71 Tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Tickell, 2010). Sehingga tinggi rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Kartikasari, 2012).

**Tabel 2.1**  
**SAP Berbasis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan**

No.	Keterangan	Penjelasan
1.	Penyusutan Aset Tetap	Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
2.	Entitas Akuntansi	Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

3.	Entitas Pelaporan	Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari : a) Pemerintah Pusat. b) Pemerintah Daerah. c) Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. d) Satuan organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
4.	Peranan Laporan Keuangan	Pelaporan diperlukan untuk kepentingan : a) Akuntabilitas b) Manajemen c) Transparansi d) Keseimbangan antar generasi e) Evaluasi kerja
5.	Komponen Laporan Keuangan	Laporan keuangan pokok : a) LRA (Laporan Realisasi Anggaran) b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c) Neraca d) Laporan Operasional (LO) e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) f) CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
6.	Basis Akuntansi	Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
7.	Unsur Laporan Keuangan	1. Laporan Pelaksanaan Anggaran a. LRA a). Pendapatan LRA b). Belanja c). Transfer d). Pembiayaan b. Laporan Perubahan SAL Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2. Laporan Financial a. Neraca a). Aset b). Kewajiban c). Ekuitas b. Laporan Operasional (LO) a). Pendapatan-LO b). Beban c). Transfer d). Pos Luar Biasa

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Menyajikan kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.</li> <li>d. Laporan Arus Kas                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Penerimaan Kas</li> <li>b). Pengeluaran Kas</li> </ul> </li> <li>e. CaLK</li> </ul>
8.	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan Pendapatan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.</li> <li>b. Pengakuan Belanja dan Beban Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.</li> </ul>
9.	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	<p>Menggunakan nilai perolehan Historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.</p>

(sumber : Tanjung, H. A. 2019)

#### 2.4.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Mardiasmo (2002:21) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Mahsun *et.all.*, (2011:142) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005). Suatu cara memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ,diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas hubungan antara kinerja pegawai dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan ini, mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, ringkasan tabel penelitian sebelumnya:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati (2016).	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Independen : Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis akrual. Dependensi : Kualitas Laporan Keuangan.	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual	1. Menambahkan variabel kinerja pegawai.



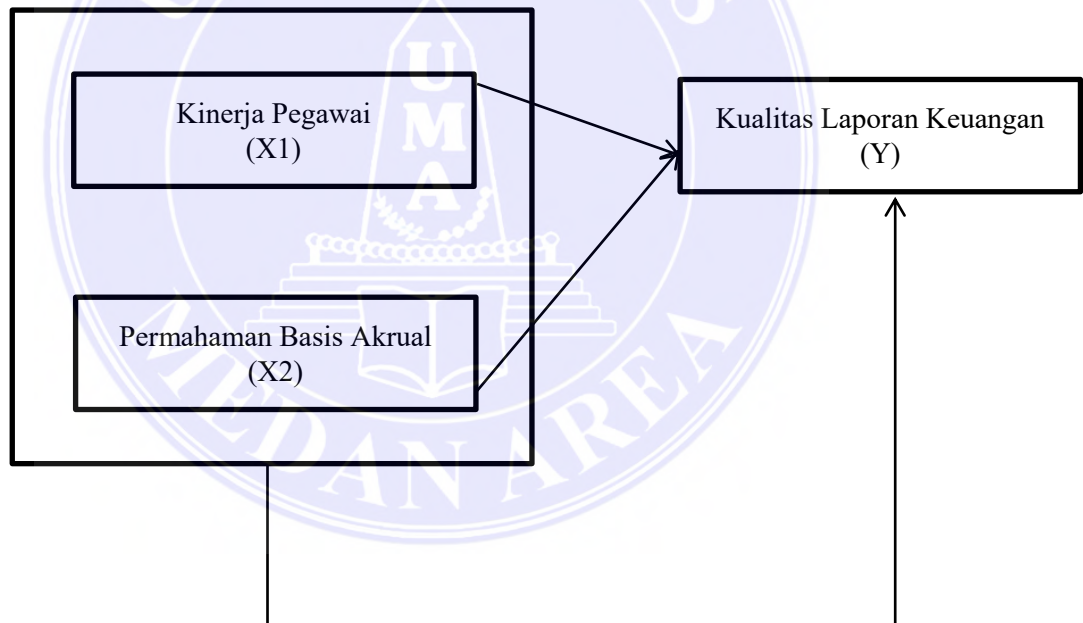
				berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	
2.	Melati Ramadhan i, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari (2018).	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten)	Independen: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Pemahaman Basis AkruaI. Dependensi : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 2. Sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 4. Pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.	1. Menambahkan variabel kinerja pegawai.
3.	Budhi Purwanto Jati (2019).	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	Independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	1. Penerapan SAP akruaI basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan	1. Menambahkan variabel kinerja pegawai.

		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	keuangan pemerintah daerah dengan menghasilkan opini yang baik dari BPK.	
4.	Eni Retnowati, Akhmad Riduwan (2020).	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Berbasis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Independen : Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Akuntansi Berbasis Akruwal Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Pemahaman akuntansi berbasis akruwal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	1. Menambahkan variabel kinerja pegawai.
5.	Meisy Hendri, Erisnos NR (2020)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat).	Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat).	1. Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Sumatera Barat. 2. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Barat. 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	1. Menambahkan variable kinerja pegawai.

Sumber : Data oleh peneliti (2022).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang kinerja pegawai merupakan variabel baru. Dengan menggunakan variabel baru tersebut diharapkan para pegawai mampu menghasilkan kinerja yang baik sehingga penyusunan serta kelengkapan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas. Sementara itu persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel pemahaman basis akrual untuk variabel bebas dan kualitas laporan keuangan untuk variabel terikat.

## 2.6 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan hubungan atau pengaruh kinerja pegawai (X1), pemahaman basis akrual (X2), yang merupakan variabel bebas terhadap kualitas laporan keuangan (Y) yang merupakan variabel

terikat. Dengan pengaruh kinerja pegawai maka di harapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, serta dengan pemahaman basis akruaI secara penuh maka dapat di katakan tinggi rendahnya tingkat pemahaman yang di dapat oleh para pegawai akan sangat berdampak baik terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Kesalahan yang dihadapi pegawai dalam memahami dan menerapkan pengetahuan akuntansi dapat berdampak pada pelaporan, seperti kesalahan dalam laporan yang disusun sesuai dengan standar yang diamanatkan pemerintah, sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang buruk.

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah yang baik, suatu pemerintahan harus memiliki pegawai yang berkualitas, baik dari segi kuantitas maupun keahlianya ( kompetensi dan pengalaman). Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala, dan berpengalaman dalam menerapkan sistem akuntansi yang sehat di bidang keuangan.

Seorang pegawai yang berkualitas harus memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya untuk membuat laporan keuangan yang sempurna, dengan kinerja yang diberikan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan yang sering terjadi dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak memenuhi standar yang di amanatkan.

Oleh sebab itu, jika pegawai tidak dididik sesuai dengan kualifikasi akademiknya di luar akuntansi dapat berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Maka dari itu kualitas laporan keuangan tidak akurat karena tidak dikelola oleh pegawai dengan pendidikan akuntansi. Dengan kinerja yang diberikan oleh para pegawai yang berkompeten laporan keuangan diharapkan dapat disajikan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

**$H_1$ : Kinerja Pegawai Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

### **2.7.2 Pengaruh Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemahaman terhadap peraturan berkaitan dengan seberapa baik tingkat seorang pegawai maupun organisasi memahami peraturan yang di tetapkan. Penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan (Jati, 2019), hasilnya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 54 Tahun 2013 yang mewajibkan semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota wajib menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI, dengan tujuan diberlakukannya PP tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pemahaman regulasi ini terkait dengan penerapan standar akuntansi berbasis akruaI baru diwajibkan pada tahun 2015 batas waktu minimal 5 tahun sejak PP No. 71 Tahun 2010 dikeluarkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan

yang lebih berkualitas, pengetahuan tentang peraturan ini diperlukan. Secara konseptual, sistem akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Akuntansi akrual diyakini dapat mendukung pelaksanaan perhitungan yang adil atas biaya berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, dan dari perspektif pengukuran kinerja, informasi sistem akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.

**$H_2$ : Pemahaman Basis AkruaI Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

### **2.7.3 Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kinerja yang diberikan oleh para pegawai yang berpengalaman dan dapat memahami dan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual maka laporan keuangan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Para pegawai yang berkompeten mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Dengan pemahaman akuntansi berbasis akrual ini diharapkan dapat mendukung perhitungan yang sebenarnya. Jika kinerja pegawai baik serta pemahaman basis akrual dapat dipahami maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemahaman atas fungsi sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pemerintahan yang memiliki pemahaman tentang

SAP berbasis akrual yang baik mengenai PP No. 71 Tahun 2010 akan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

***H<sub>3</sub>*: Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis AkruaI Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode kausal (*causal reseach*). Penelitian yang mencari hubungan yang bersifat sebab akibat dari variabel independen dengan variabel dependen merupakan penelitian kausal (Sugiyono, 2014). Berdasarkan landasan teori dan asumsi yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pegawai dan pemahaman regulasi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitan yang di pilih dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat, 20112.

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022. Untuk jelasnya berikut penjelasan waktu penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2022			2023
		Feb-Mei	Jun-Agus	Sep-Des	Jan-Feb
1.	Pengajuan Judul				
2.	Pembuatan Proposal				
3.	Seminar Proposal				
4.	Pengumpulan Data dan Analisis Data				
5.	Seminar Hasil				
6.	Pengajuan Sidang Meja Hijau				
7.	Sidang Meja Hijau				

Sumber : Data oleh peneliti (2022)

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah subjek dan objek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sementara populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat yang berkaitan dengan keuangan.

**Tabel 3.2**  
**Populasi**

Keterangan		Jumlah
Divisi Administrasi	Bagian Program dan Hubungan Masyarakat	1 (Bendahara Divisi) 4 (Staff Pelaksana)
	Bagian Umum	1 (Kepala Bagian Keuangan) 14 (Staff Pelaksana)
Divisi Pemasarakatan	Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi	1 (Bendahara Divisi) 4 (Staff Pelaksana)
	Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang	4 (Staff Pelaksana)

	Rampasan Negara, Keamanan	
Divisi Keimigrasian	Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	1 (Bendahara Divisi) 4 (Staff Pelaksana)
	Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	4 (Staff Pelaksana)
Divisi Pelayanan Hukum dan Ham	Bidang Pelayanan Hukum	1 (Bendahara Divisi) 4 (Staff Pelaksana)
	Bidang Hukum	4 (Staff Pelaksana)
	Bidang Hak Asasi Manusia	4 (Staff Pelaksana)
Total Sampel		51

Sumber : data diolah peneliti (2022)

Dengan demikian, berdasarkan tabel populasi diatas maka diperoleh sampel akhir sebanyak 51 pegawai keuangan meliputi kepala keuangan/akuntansi, bendahara dan staf pelaksana yang berwenang.

### 3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:18) sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi. Sampel ini merupakan langkah-langkah untuk menentukan ukuran sampel yang akan dipilih untuk melakukan suatu penelitian. Pemilihan sampel ini harus benar-benar representatif dan mampu menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan dengan metode sampel jenuh (sampel sensus) berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Sugiono (2002: 61-63), yang berpendapat bahwa “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.

Menurut Sugiyono (2012:73) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Banyaknya suatu sampel yang akan diambil dari suatu populasi merupakan ukuran sampel. Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebanyak 51 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan sampel jenuh yang di bantu oleh kuesioner.

### 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap suatu variabel dependen (Ghozali, 2009). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

a : Nilai Konstanta

$b_1$  : Koefisien Regresi Kinerja Pegawai (X1)

$b_2$  : Koefisien Regresi Pemahaman Basis AkruaI (X2)

X1 : Kinerja Pegawai

X2 : Pemahaman Basis AkruaI

$e$  : error

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2013:59) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen . Adapun penjelasannya sebagai berikut

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Kinerja Pegawai	Mangkunegara (2015) menyatakan bahwa "hasil kerja, serta kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung jawab yang dilimpahkan, merupakan hasil efisiensi".	1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Efektifitas, 5. Kemandirian	Rasio.
2.	Pemahaman Basis AkruaI	Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) 'paham' mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau	Kemampuan dalam memahami dan mengerti tentang proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Rasio.

		memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Dalam penelitian ini seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	
3.	Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan</li> <li>2. Andal</li> <li>3. Dapat dipahami</li> <li>4. Dapat dibandingkan</li> </ol>	Rasio.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2017:137). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner serta *interview*.

Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, karena responden hanya perlu menandai satu jawaban yang dianggap benar. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh orang yang melakukan penelitian untuk mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument kuesioner, yaitu daftar periksa pernyataan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi berupa tanggapan dari responden. Pengukuran menggunakan skala rasio dengan model skala likert dengan 5 alternatif jawaban, skala likert mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas sebuah fenomena (Sugiyono, 2017).

**Tabel 3.4**  
**Skala Likert**

Item Instrumen		
No.	Skala Likert	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2017)

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara (interview), dimana yang akan di tanyakan adalah tentang bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruar sudah di terapkan dengan baik. Menurut Sugiyono (2017) , wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

### 3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum dilakukan analisis, akan dilakukan beberapa pengujian, seperti analisis statistik deskriptif dan uji kualitas data.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah tes yang menggunakan uraian atau keterangan tentang data yang dapat dilihat dari mean (rata-rata), standar deviasi, varians, dan lain-lain. (Ghozali, 2016:150). Variabel independen dan dependen penelitian ini adalah kinerja karyawan, pemahaman basis akruaI dan kualitas laporan keuangan.

#### 3.6.2 Uji Kualitas Data

Jika kuesioner digunakan dalam penelitian, kualitas informasi harus diperiksa. Sama halnya dengan penelitian ini, hal ini dikarenakan peneliti perlu mengetahui bahwa alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Efektif dan dapat diandalkan, keaslian data yang diproses dapat dikatakan berkualitas tinggi. Dengan menguji kualitas data ini, peneliti dapat menguji validitas dan reliabilitasnya.

##### 3.6.2.1 Uji Validitas

Jika suatu instrumen dikatakan valid maka dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya (Retnowati & Riduwan, 2020). Kondisi untuk menyelesaikan soal di atas apabila ketika  $r$  hitung  $> r$  tabel. Sebaliknya, jika  $r$  hitung  $< r$  tabel maka pertanyaan tidak valid (Ghozali, 2016:155).

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari satu variabel. Sebuah survei dianggap dapat diandalkan ketika jawaban atas pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 20016). Pada hasil uji reliabilitas dapat digunakan metode *Alpha Cronbach*, dalam hal ini kriteria *Alpha Cronbach* setiap variabel lebih besar dari 0,60 maka dapat disebut reliabel (Ghozali, 2016:158).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dalam penelitian ini memenuhi persyaratan untuk lulus uji penerimaan klasik. Syaratnya adalah data harus berdistribusi normal dan tidak mengandung multikolinearitas atau heteroskedastisitas. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik (Ghozali, 2016). yang terdiri dari :

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdapat distribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah variabel pengganggu berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik (*histogram dan normal probability plot*) atau uji statistik (*kolmogorov-smirnov*). Untuk mendeteksi normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Nilai sig < 0,05, distribusi adalah tidak normal.



b. Nilai  $\text{sig} > 0,05$ , distribusi adalah normal.

Uji normalitas menggunakan analisis grafik, yaitu grafik histogram dan plot probabilitas normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji grafik adalah, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan karena asumsi dalam analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen harus bebas dari multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi meningkat. Namun jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi kesalahan multikolinearitas yang berarti model regresi tidak baik.

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan

lain disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Beberapa metode yang digunakan antara lain melihat grafik plot antara penilaian variabel uji (dependen), yaitu ZPRED dan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban teoritis yang terdapat dalam pernyataan-pernyataan tersebut didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data.

#### 3.6.4.1 Uji Statistik (Uji T)

Uji-t atau uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk menguji ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y digunakan statistik uji-t. Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi perangkat lunak IBM SPSS Statistics sehingga pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat. Uji-t (t-test) menguji koefisien

regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi parsial peran variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan, Sugiyono (2017) Uji statistik t disebut juga uji signifikan individu. Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada akhirnya akan ditarik kesimpulan apakah  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima dari hipotesis yang dirumuskan.

Kriteria ditentukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan menggunakan t -tabel *critical-price table* dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Kriteria diterima atau diterimanya hipotesis nol ( $H_0$ ) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0$  diterima jika thitung berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , dimana:  
 $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $Sig > (0,05)$
- b.  $H_0$  ditolak jika thitung berada pada daerah registrasi  $H_0$ , dimana:  
 $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $Sig < (0,05)$ .

Jika  $H_0$  diterima, maka dapat dikatakan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dianggap tidak signifikan. sedangkan jika  $H_0$  ditolak maka pengaruh variabel bebas terhadap ketergantungan adalah signifikan. Selain perbandingan antara t hitung dan t tabel, cara lain untuk mengetahui apakah  $H_0$  diterima atau ditolak adalah dengan melihat tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. dalam penelitian ini tingkat signifikansinya adalah 5% atau ( $\alpha = 5\%$ ). Dengan taraf signifikansi 5% berarti :

- a. jika angka signifikansi  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
- b. Jika angka Signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

### 3.6.4.2 Uji Kelayakan (Uji F)

Kecocokan model diuji dengan menggunakan uji statistik F. Untuk mengetahui apakah model termasuk kelas *fit* atau tidak. Jika nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan layak untuk digunakan pada penelitian ini.

### 3.6.4.3 Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0-1. Nilai yang rendah menggambarkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat begitu terbatas. Di sisi lain, nilai yang dekat dengan satu variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Kurniawan (2014) koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R<sup>2</sup> = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pegawai, dan Pemahaman Basis AkruaI, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut.
2. Kinerja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut.
3. Pemahaman Basis AkruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara
  - a. Dikarenakan faktor yang paling dominan adalah faktor kuantias kerja yang diberikan kepada pegawai oleh organisasi kurang

memperhitungkan target kerja yang ditetapkan, maka sebaiknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, menetapkan target kerja yang diperhitungkan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

- b. Dikarenakan faktor yang paling dominan adalah faktor teknis yaitu, pegawai tidak selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP, maka sebaiknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, agar selalu mengarahkan dan menciptakan alur kerja yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Dikarenakan faktor yang paling dominan adalah faktor dapat dibandingkan dimana pegawai selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, maka sebaiknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumut, agar dapat menciptakan standar prosedur operasi kerja yang dinamis dengan kebijakan akuntansi terbaru, diharapkan dengan begitu pegawai dapat menggunakan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi hal tersebut di luar variabel penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam. Namun apabila peneliti berikutnya ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama, sangat diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel bebas atau menggantinya dengan variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- As`ad, M. (2008). *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Yogyakarta Lyberty.
- Asnawi, M. A. (2019). *Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas: Studi Kasus Atas Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Karakteristik Pekerjaan*. Gorontalo: CV. Athra Samudra.
- Anggraini S. Madjham et. al. (2012). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara)*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo.
- Defitri, S. Y. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Derah*. Jurnal Benefita, 50-62.
- Farlen, F. (2011). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. United Tractors Tbk Samarinda)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan: Berbasis AkruaI*. Tangerang: STAN Press.
- Jati, P. B. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 21 No. 1.
- Jaga Kualitas Laporan Keuangan. Kemenkumham.go.id. 11 Februari 2021. 10 April 2022. <http://www.kemenkumham.go.id/>.
- Kartika, D. (2012). *Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali)*. Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Semarang
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok,
- Kinarayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16 No. 2 (1290-1318). ISSN: 2303-8556.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahah. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba

Empat.

- Kurniawan, Zuki. (2016). *Sumber Daya Manusia dalam Organisasi & Manajemen: Konsep dan Dimensi Peningkatan Produktivitas Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lamonisi, Sony. (2016). *Analisis Penerapan Standart Akuntansi Berbasis Akruial Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. Vol. 4. No.1.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.
- Mangkunegara, P. A. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mangkunegara, P. A. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mas'ud, F. (2008). *Mitos Manajemen Sumber Daya Manusia*. Badan Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. (2021). *Jaga Kualitas Laporan Keuangan*. (<http://www.kemenkumham.go.id/>, diakses 14 Februari 2022)
- Najati, I., & Pituringsih, E., & Animah. (2016). *Implementasi Akuntans Berbasis Akruial: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga*. Jurnal Akuntansi. Vol. 14 No.1. Universitas Jember.
- Nawawi, Hadari. (2006). *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nicholas, Walliman. (2010). *Research Methods The Basic: 2<sup>nd</sup> Edition*. Oxford:Routledge.[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2317618/mod\\_resource/content/1/BLOCO%22\\_Research%20Methods%20The%20Basi%20cs.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2317618/mod_resource/content/1/BLOCO%22_Research%20Methods%20The%20Basi%20cs.pdf) (diakses tanggal 10 April 2022).
- Nurillah, As Syifa. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol.1 No. 1. Hal: 2337-3806.
- Pamungkas, B. (2018). *Determinan Penerapan Basis Akruial Secara Penuh Pada Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol. XXII No. 01.
- Purnomo, J. (2008). *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Dan*



*Perkebunan Kabupaten Jepara. Jurnal Sumber Daya Manusia.*

Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Putri, D. I., S. Rahayu, & A. Nurbaiti. (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akruial, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* E-Proceeding of Management 4(2): 1732-1739.

Rahmadani. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat).* Jom Fekon Vol. 2 No. 2. Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia.

Ramadhani, M., Soerono, N. A., & W. Mulyasari. (2018). *Pengaruh Sumber Daya, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi Dan Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten).* Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 22 No. 1, Hal 40-63.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 tentang Keuangan Negara.*

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan..*

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (revisi PP No. 24 Tahun 2005).*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 7 Pasal 320 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.*

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang*

*Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).*

- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 10 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah [JDIH BPK RI]*.
- Retnowati, E., & Riduwan, A. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *Junal Ilmu dan Riset Akuntansi*. E-ISSN: 2460-085. Hal 2.
- Rival, Veithzal. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Robbins, P. S., & Judge, A. T. (2010). *Organizational Behavior Edition 15*. New Jersey: Pearson Education.
- Rozarie, R. De. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: CV. Rozarie.
- Rustan., & ChaikaL, M. (2019). *Penggunaan Basis AkruaI Dalam Laporan Kurngan Pemerintah Kabupaten Watampone*. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol. 2 No. 2. P-ISSN: 2714-6308. E-ISSN: 2714-6249.
- Scott, William, R. (2012). *Financial Accounting Theory-6<sup>th</sup> edition*. Canada: Prentice Hall.
- Sinamora, H. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. [Sumut.kemenkumham.go.id](https://sumut.kemenkumham.go.id). 2022. 14 November 2022. <https://sumut.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>.
- Tanjung, H. A. (2019). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis akruaI: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta.
- Tickell, G. (2010). *Cash To Accrual Accounting: One Nation`s Dilemma*. *Internasional Bussiness & Economics research Journal*. Vol. 9 No. 11. Hal 71-78.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN**

Perihal: Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner

Lampiran: Kuesioner Penelitian

**Kepada Yth,**

**Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden**

**Di tempat**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya **Dinda Lilly Sarah**, saya merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area, meminta kesediaan Bapak, Ibu, Saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Penelitian ini digunakan untuk menyusun skripsi/tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara”**.

Oleh karena itu diperlukan dukungan dan partisipasi dari para responden untuk dapat meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dengan sebaik mungkin. Semua informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Demikian saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi responden dalam pengisian kuesioner ini.

Hormat saya,

Medan, 12 Juli 2022

(Dinda Lilly Sarah)

## A. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Kuesioner ini ditujukan kepada para pegawai bagian keuangan atau mengenai akuntansi di setiap divisinya.
2. Jawaban yang disampaikan kepada peneliti akan melihat pengaruh dari kinerja pegawai, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal diharapkan Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur.

## B. DESKRIPSI RESPONDEN

Nama Responden : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

Pendidikan Terakhir :  Sederajat  
 Diploma (D3)  
 Strata 1 (Sarjana)  
 Strata 2 (Master)  
 Strata 3 (Doktor)

Jabatan :  Sekretaris/Kabid/Kabag  
 Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie  
 Pegawai

Lama Bekerja :  1 – 5 tahun  
 6– 10 tahun  
 11 – 15 tahun  
 16 – 20 tahun  
 ≥ 21 tahun

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Anda dengan membubuhkan tanda ( ✓ )

Setiap Pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban

SS (5) = Sangat Setuju

S (4) = Setuju

N (3) = Netral

TS (2) = Tidak Setuju

STS (1) = Sangat Tidak Setuju

## 1. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Relevan</b>						
1.	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
2.	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
3.	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (feedback value).					
4.	Informasi dalam Laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (predictive value)					
<b>Andal</b>						
5.	Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
6.	Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
7.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan, teruji kebenarannya.					
8.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan.					
9.	Informasi yang dihasilkan dalam LKKL yang saya susun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					

<b>Dapat Dibandingkan</b>					
10.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				
11.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.				
12.	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.				
<b>Dapat Dipahami</b>					
13.	Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.				
14.	Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna .				
15.	Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.				



## 2. PEMAHAMAN BASIS AKRUAL (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik					
2.	Seluruh penyajian laporan keuangan telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan yang diwajibkan oleh SAP berbasis akrual.					
3.	Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan nilai informasi yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami) kepada pengguna.					
4.	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penata usahaan laporan keuangan					
5.	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.					
6.	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi.					
7.	Saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
8.	Saya selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.					

9.	Proses implementasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi serta perbaikan terhadap penerapan sistem SAP berbasis akrual melibatkan seluruh pegawai.					
10.	Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dinas ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.					
11.	Basis akuntansi akrual pada dinas ini untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.					

### 3. KINERJA PEGAWAI (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Kualitas</b>						
1.	Anda mengerjakan suatu pekerjaan dengan penuh perhitungan.					
2.	Kualitas pekerjaan yang saya sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.					
<b>Kuantitas</b>						
3.	Jumlah dari hasil pekerjaan yang anda jalani selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.					
4.	Perusahaan menetapkan target kerja dengan penuh perhitungan.					
<b>Ketepatan Waktu</b>						
5.	Anda selalu datang ke kantor tepat waktu.					
6.	Anda selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.					
<b>Efektifitas</b>						
7.	Anda dapat menggunakan saran yang tersedia secara efektif.					
8.	Saran yang ada membantu anda dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif.					
<b>Kemandirian</b>						
9.	Anda mampu mengambil inisiatif dalam bekerja.					
10.	Anda bisa bekerja secara mandiri dan bekerja sama dengan semua pegawai.					

Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden

**Tabulasi Jawaban Responden**

P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	X 1	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	X 2	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	Y	
5	5	5	5	5	5	3	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	4	4	3
5	5	5	5	5	5	3	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	3	5	5	5	2	8	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3
5	4	3	5	5	5	2	7	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3
4	4	3	5	4	4	2	4	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	3	6	3
4	3	5	5	4	4	2	5	5	5	3	4	3	5	5	3	4	0	5	5	5	5	4	5	4	3	6	3
4	3	5	5	4	4	2	5	5	3	5	4	3	5	3	5	4	0	5	5	5	5	5	5	5	3	8	3
4	3	5	5	4	4	2	5	4	3	5	4	3	4	3	5	4	3	8	3	4	5	5	4	5	4	3	3
4	3	5	5	4	4	2	5	4	3	5	4	3	4	3	5	4	3	8	3	4	5	5	4	5	4	5	3
4	5	5	5	4	4	2	7	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	3	4
4	5	5	5	4	4	2	7	4	4	5	4	3	4	4	5	4	0	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4
3	5	5	5	4	4	2	6	4	4	5	4	3	4	4	5	4	0	4	4	4	4	4	4	5	3	5	3
3	5	5	5	4	4	2	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	4	4	4	4	4	5	4	5	4
3	5	5	5	4	4	2	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	4	4	4	4	5	5	3	5	4
3	4	5	5	3	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	4	4	4	4	4	5	3	4	2
3	4	5	5	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	6	4	4	4	4	4	5	5	4	4
3	4	5	5	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	6	4	4	4	4	5	5	3	4	3
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	6	4	4	4	4	5	5	4	4	4
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	4	4	4	4	5	5	3	4	3
3	5	5	5	3	3	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	3	3	4	4	5	5	4	4	2
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	3	4	4	4	5	5	3	4	2
3	4	3	5	4	4	2	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	6	3	3	4	3	5	5	3	4	0
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	3	3	4	3	3	5	4	4	2
3	3	3	5	4	4	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	5	4	3	5	5	4	4	4	3
3	5	4	5	4	4	2	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	3	4	4	3	3	3	3	4	7
3	4	4	5	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	3	4	4	3	3	3	5	4	9
3	3	5	5	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	3	5	4	3	3	3	5	3	9
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	4	5	4	3	3	3	4	3	2
3	4	3	5	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	4	5	4	3	3	3	4	3	9
5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3



5	5	5	5	5	5	3	0	5	5	5	4	3	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	9
5	4	5	5	5	5	2	9	5	5	5	4	3	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	9
4	4	5	5	4	4	2	6	5	5	5	4	3	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	7
4	3	5	5	4	4	2	5	5	5	3	4	3	5	5	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	7
4	3	5	5	4	4	2	5	5	3	5	4	3	5	3	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	8
4	3	5	5	4	4	2	5	4	3	5	4	3	4	3	5	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4
4	3	5	5	4	4	2	5	4	3	5	4	3	4	3	5	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	6
4	5	5	5	4	4	2	7	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	3	3	4
4	5	5	5	4	4	2	7	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4
3	5	5	5	4	4	2	6	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	3	3	4
3	5	5	5	4	4	2	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	5	3	3	5
3	5	5	5	4	4	2	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	3	5	3	3	4
3	4	5	5	3	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	3	4	3	3	3
3	4	5	5	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	3	3	5
3	4	5	5	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	3	4	3	3	3
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	2
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	3	4	3	3	2
3	5	5	5	3	3	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	4	3	3	3	2
3	4	5	5	4	4	2	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	4	3	3	3	2

### Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Orang	Persen (%)
< 26 tahun	6	7
26-35 tahun	48	56
> 35 tahun	31	37

Sumber: Lampiran 4

### Distribusi Frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Orang	Persen
Laki-Laki	85	100
Perempuan	0	0

Sumber: Lampiran 4

**Distribusi Frekuensi berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Orang	Persen
SD	10	12
SMP	53	62
SMA	22	26
Lainnya	0	0

Sumber: Lampiran 4

**Distribusi Frekuensi berdasarkan Lama Bekerja**

Lama Bekerja	Orang	Persen
1-5 tahun	45	53
6-10 tahun	21	25
> 10 tahun	19	22

Sumber: Lampiran 4

**Distribusi Frekuensi berdasarkan Jurusan**

Jurusan	Orang	Presen
Akuntansi	22	43.1
Hukum	10	19.7
Manajemen	7	13.7
Teknik	5	9.8
Lainnya	7	13.7
Total	51	100.0

**Jawaban responden tentang Variabel Kinerja Pegawai ( $X_1$ )**

Pernyataan	Keterangan										Mean	Ket
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Anda mengerjakan suatu pekerjaan dengan penuh perhitungan.	9	17,6	28	54,9	8	15,7	5	9,8	1	2,0	3,76	S
Kualitas pekerjaan saya sudah sesuai dengan yang diharapkan organisasi.	7	13,7	37	72,5	5	9,8	1	2,0	1	2,0	3,94	S
Jumlah dari hasil pekerjaan yang anda jalani selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.	9	17,6	32	62,8	5	9,8	4	7,8	1	2,0	3,86	S
Organisasi menetapkan target kerja dengan penuh perhitungan.	6	11,8	29	56,8	7	13,7	8	15,7	1	2,0	3,61	S
Anda selalu datang	6	11,8	30	58,8	8	15,7	6	11,7	1	2,0	3,67	S

kekantor tepat waktu.													
Anda selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.	8	15,7	32	62,7	6	11,8	4	7,8	1	2,0	3,82	S	
Anda dapat menggunakan saran yang tersedia secara efektif.	5	9,8	36	70,6	4	7,8	5	9,8	1	2,0	3,76	S	
Saran yang ada membantu anda dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif.	7	13,7	34	66,7	4	7,8	5	9,8	1	2,0	3,80	S	
Anda mampu mengambil inisiatif dalam bekerja.	6	11,8	31	60,7	7	13,7	6	11,8	1	2,0	3,69	S	
Anda bisa bekerja secara mandiri dan bekerja sama dengan semua pegawai.	9	17,7	37	72,5	2	3,9	2	3,9	1	2,0	4,00	S	
<b>Rata-Rata Variabel Kinerja Pegawai (X<sub>1</sub>)</b>											3,79	Setuju	

Sumber : Lampiran 8

### Jawaban responden tentang Variabel Pemahaman Basis AkruaI (X<sub>2</sub>)

Pernyataan	Keterangan										Mean	Ket
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik	8	15,7	39	76,5	2	3,9	2	3,9	0	0	4,04	S
Seluruh penyajian laporan keuangan telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan	9	17,6	35	68,7	2	3,9	4	7,8	1	2,0	3,92	S



Keuangan sesuai dengan yang diwajibkan oleh SAP berbasis akrual.												
Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan nilai informasi yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami) kepada pengguna.	5	9,8	31	60,8	11	21,6	3	5,8	1	2,0	3,71	S
Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penata usahaan laporan keuangan	5	9,8	28	54,9	5	9,8	12	23,5	1	2,0	3,47	S
Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.	4	7,8	27	52,9	11	21,6	8	15,7	1	2,0	3,49	S
Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi.	3	5,9	35	68,6	5	9,8	7	13,7	1	2,0	3,63	S
Saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.	4	7,8	35	68,6	6	11,8	5	9,8	1	2,0	3,71	S
Saya selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.	4	7,8	30	58,8	3	5,9	13	25,5	1	2,0	3,45	S
Proses implementasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi serta perbaikan terhadap penerapan sistem	8	15,7	30	58,8	5	9,8	7	13,7	1	2,0	3,73	S

SAP berbasis akrual melibatkan seluruh pegawai.													
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dinas ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.	7	13,7	38	74,5	2	3,9	3	5,9	1	2,0	3,92	S	
Basis akuntansi akrual pada dinas ini untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.	4	7,8	37	72,5	7	13,8	3	5,9	0	0	3,82	S	
<b>Rata-Rata Variabel Pemahaman Basis Akruar (X<sub>2</sub>)</b>											3,71	S	

Sumber: Lampiran 10

### Jawaban responden tentang Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pernyataan	Keterangan										Mean	Ket
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	8	15,6	40	78,4	1	2,0	1	2,0	1	2,0	4,04	S
Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.	9	17,6	36	70,6	0	0	5	9,8	1	2,0	3,92	S
Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (feedback value).	8	15,7	33	64,7	5	9,8	5	9,8	0	0	3,86	S
Informasi dalam Laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan	10	19,6	35	68,7	2	3,9	4	7,8	0	0	4,00	S

sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (predictive value)												
Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	9	17,6	35	68,6	0	0	6	11,8	1	2,0	3,88	S
Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	11	21,6	36	70,6	1	2,0	3	5,9	0	0	4,08	S
Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan, teruji kebenarannya.	8	15,7	38	74,5	2	3,9	3	5,9	0	0	4,00	S
Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan.	10	19,6	36	70,6	1	2,0	4	7,8	0	0	4,02	S
Informasi yang dihasilkan dalam LKKL yang saya susun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.	10	19,6	36	70,6	1	2,0	4	7,8	0	0	4,02	S
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	9	17,6	34	66,7	2	3,9	6	11,8	0	0	3,90	S
Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan	9	17,6	36	70,6	0	0	5	9,8	1	2,0	3,92	S

akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.												
Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.	9	17,6	33	64,7	2	3,9	6	11,8	1	2,0	3,84	S
Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.	8	15,7	40	78,4	0	0	2	3,9	1	2,0	4,02	S
Informasi yang dihasilkan dari LKKL yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna .	9	17,5	39	76,5	1	2,0	1	2,0	1	2,0	4,06	S
Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.	10	19,5	39	76,5	0	0	1	2,0	1	2,0	4,10	S
<b>Rata-Rata Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)</b>											3,70	Setuju

Sumber : Lampiran 14

## Lampiran 3 : Hasil Uji Statistik

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.061	2.868		2.113	.038
	Kinerja Pegawai	.536	.143	.389	3.761	.000
	Pemahaman Basis AkruaI	.364	.093	.407	3.937	.000

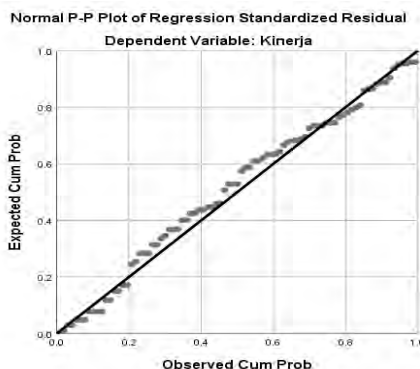
a. Dependent Variable: Kinerja

***Kolmogorov-Smirnov*****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized
		Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24620216
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.054
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Lampiran 17



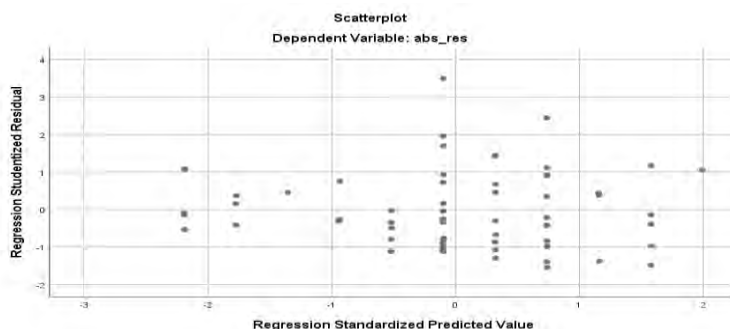
**Grafik P-Plot**

**Uji Glejser**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.421	1.660		3.266	.002
	Kinerja Pegawai	-.147	.082	-.261	-1.786	.078
	Pemahaman Basis AkruaI	.000	.054	.001	.006	.995

a. Dependent Variable: abs\_res  
 Sumber : Lampiran 18



**Grafik Scatterplot**

## Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.061	2.868		
	Kinerja Pegawai	.536	.143	.531	1.883
	Pemahaman Basis AkruaI	.364	.093	.531	1.883

a. Dependent Variable: Kinerja

## Koefisien Determinasi

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 <sup>a</sup>	.534	.523	2.273

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Basis AkruaI, Kinerja Pegawai

b. Dependent Variable: Kinerja  
Sumber: Lampiran 20

## Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-F)

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	485.996	2	242.998	47.015	.000 <sup>b</sup>
	Residual	423.816	82	5.168		
	Total	909.812	84			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Basis AkruaI, Kinerja Pegawai  
Sumber: Lampiran 21

## Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t)

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.061	2.868		2.113	.038
	Kinerja Pegawai	.536	.143	.389	3.761	.000
	Pemahaman Basis AkruaI	.364	.093	.407	3.937	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

**Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)**

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526



**Tabel Uji F**

$\alpha = 0,05$	$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.44 <sub>8</sub>	199.500	215.70 <sub>7</sub>	224.583	230.162	233.98 <sub>6</sub>	236.768	238.883
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas_ekonomi@uma.ac.id	
<hr/>		
Nomor	: 1640/FEB/01.1/ VII/2022	02 Juli 2022
Lamp	:	
Perihal	: Izin Research / Survey	
<b>Kepada Yth,</b> <b>Kantor Wilayah Kementerian Hukum</b> <b>Dan HAM Sumatera Utara</b>		
Dengan hormat,		
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :		
N a m a	:	DINDA LILLY SARAH
N P M	:	188330201
Program Studi	:	Akuntansi
Judul	:	<b>Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara</b>
Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.		
Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.		
Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.		
Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni		
 Dr. Wawan Suryani, SE, M.Si		
<b>Tembusan :</b>		
1. Wakil Rektor Bidang Akademik		
2. Kepala LPPM		
3. Mahasiswa ybs		
Ditandatangani		

## Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan  
Telepon: (061)-4552109 Fax: (061)- 4521217

Laman: <http://sumut.kemerkumham.go.id> Surel: kanwilsumut@kemerkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01- 22725

11 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Universitas Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Medan Area Nomor: 1640/FEB/01.1/V/2022 tanggal 2 Juni 2022 hal tersebut pada pokok surat, serta tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W.2-UM.01.01-18605 tanggal 5 Juli 2022 hal Izin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Dinda Lilly Sarah	188330201

telah selesai melaksanakan Penelitian pada Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan baik.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Rudi Hartono  
NIP 196509021985031001